

**KOMUNIKASI POLITIK DAN POLARISASI PUBLIK: STUDI LITERATUR DARI
PERSPEKTIF MEDIA MASSA**

Melati Budi Srikandi

Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: melatibs@undiknas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence political polarization and identify effective political communication strategies to reduce it. This study uses a qualitative approach by analyzing relevant literature, including previous studies, reports, and articles from trusted sources. The results of the study show that political polarization is influenced by factors such as strong political identity, economic and social inequality, the role of political elites, and the influence of mass media, especially social media algorithms and the spread of disinformation. Effective political communication strategies include transparency and accountability, positive use of social media, the role of community leaders as mediators, and increasing political and media literacy. These findings indicate the importance of democratic and inclusive political communication to reduce polarization. Transparency and accountability build public trust, while social media can be used for constructive dialogue. Community leaders can bridge differences, and political literacy helps people process information critically. Conclusion Political polarization is a complex challenge that requires a multi-faceted approach. Effective political communication strategies, which involve transparency, positive use of social media, the role of community leaders, and increasing political literacy, are key to reducing polarization and building a more inclusive and democratic society.

Keywords: Political polarization, political communication, social media, political literacy, public figures.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi polarisasi politik dan mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang efektif untuk menguranginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur yang relevan, termasuk penelitian terdahulu, laporan, dan artikel dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan Polarisasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti identitas politik yang kuat, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, peran elite politik, dan pengaruh media massa, terutama algoritma media sosial dan penyebaran disinformasi. Strategi komunikasi politik yang efektif meliputi transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan media sosial secara positif, peran tokoh masyarakat sebagai mediator, dan peningkatan literasi politik dan media. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi politik yang demokratis dan inklusif untuk mengurangi polarisasi. Transparansi dan akuntabilitas membangun kepercayaan publik, sementara media sosial dapat dimanfaatkan untuk dialog konstruktif. Tokoh masyarakat dapat menjembatani perbedaan, dan literasi politik membantu masyarakat mengolah informasi secara kritis. Kesimpulannya Polarisasi politik merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan multi-faceted. Strategi komunikasi politik yang efektif, yang melibatkan transparansi, pemanfaatan media sosial secara positif, peran tokoh masyarakat, dan peningkatan literasi politik, merupakan kunci untuk mengurangi polarisasi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Kata Kunci: Polarisasi politik, komunikasi politik, media sosial, literasi politik, tokoh masyarakat.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan, informasi, dan gagasan yang berkaitan dengan politik kepada publik. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti politisi, partai politik, media massa, dan masyarakat umum (Bahtiar, 2019). Komunikasi politik bertujuan untuk memengaruhi opini publik, memobilisasi dukungan politik, dan membentuk kebijakan publik. Dalam era digital, komunikasi politik semakin kompleks dan dinamis dengan hadirnya berbagai platform media sosial dan teknologi informasi (Razali & Hussin, 2021). Media massa, sebagai salah satu saluran utama komunikasi politik, memiliki peran yang krusial dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Media massa dapat membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik, kandidat politik, dan kebijakan pemerintah (Vivifriskilangela., 2023). Namun, perkembangan teknologi dan perubahan lanskap media telah menciptakan tantangan baru dalam dinamika komunikasi politik, terutama terkait dengan fenomena polarisasi publik.

Polarisasi publik merujuk pada pembelahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Fenomena ini dapat mengancam kohesi sosial, stabilitas politik, dan kualitas demokrasi. Media massa, dengan berbagai platform dan algoritmanya, dapat memperkuat polarisasi publik melalui penyebaran informasi yang bias, framing yang partisan, dan pembentukan echo chambers (Törnberg, 2018), (Kadir, 2022). Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi politik dan polarisasi publik dari perspektif media massa. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana media massa dapat berkontribusi pada polarisasi publik, faktor-faktor yang memengaruhi polarisasi, serta dampak polarisasi terhadap proses demokrasi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi komunikasi politik yang dapat mengurangi polarisasi dan mendorong dialog yang konstruktif di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap media dan memberikan dampak yang signifikan terhadap komunikasi politik. Media sosial, misalnya, telah menjadi platform penting bagi politisi dan partai politik untuk berinteraksi langsung dengan konstituen mereka. Namun, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda politik yang dapat memperburuk polarisasi publik (Septiyadi et al., 2021), (Zonyfar et al., 2022). Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dinamika komunikasi politik dan polarisasi publik di era digital. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada polarisasi, kita dapat mengembangkan strategi komunikasi politik yang lebih inklusif dan demokratis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, termasuk politisi, jurnalis, dan masyarakat umum, untuk membangun ruang publik yang lebih sehat dan berimbang.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi politik dan polarisasi publik dari perspektif media massa berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris yang telah ada. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal akademik, buku, laporan penelitian, artikel media massa, dan sumber-sumber online terpercaya lainnya. Pencarian literatur akan dilakukan melalui database akademik seperti ProQuest, Google Scholar, dan ScienceDirect, dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "komunikasi politik", "polarisasi publik", "media massa", "media sosial", "demokrasi", dan "propaganda". Proses pengumpulan data akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mencatat informasi bibliografi dan merangkum poin-poin penting dari setiap sumber literatur yang dikumpulkan. Analisis data akan dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan. Tema-tema tersebut akan dikelompokkan dan dihubungkan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara komunikasi politik dan polarisasi publik. Proses analisis data akan melibatkan interpretasi kritis terhadap literatur yang ada, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang relevan. Hasil analisis data akan disajikan secara deskriptif dan analitis, dengan memberikan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana media massa dapat berkontribusi pada polarisasi publik, faktor-faktor yang memengaruhi polarisasi, serta dampak polarisasi terhadap

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



proses demokrasi. Selain itu, analisis juga akan mengeksplorasi strategi komunikasi politik yang dapat mengurangi polarisasi dan mendorong dialog yang konstruktif di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan.

PEMBAHASAN

1. Kontribusi Media Massa terhadap Polarisasi Publik

Media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan memperkuat polarisasi publik, terutama dalam konteks politik. Dalam era digital saat ini, media sosial dan media massa konvensional saling berinteraksi, menciptakan ruang bagi opini publik yang terpolarisasi. Penelitian menunjukkan bahwa algoritme media sosial berkontribusi terhadap polarisasi dengan menciptakan "ruang gema" di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri (Sitorus, 2024; Fariansyah et al., 2020). Hal ini diperkuat oleh konten visual yang menarik, yang dapat memicu respons emosional dan memperkuat sikap yang sudah ada (Sitorus, 2024).

Lebih jauh lagi, media massa sering kali tidak netral dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang mengarah pada penyajian informasi yang bias. Kodoati dan Maida Kodoati & Maida (2023) menyoroti bahwa media massa sering kali dikendalikan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki kekuasaan dalam menentukan tema dan informasi yang disebar. Ini menciptakan tantangan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi media, yang sangat penting dalam menghadapi informasi yang tidak seimbang (Sihombing & Setiawan, 2022).

Dalam konteks pemilu, seperti yang diteliti oleh Sitorus (Sitorus, 2024), interaksi sosial di platform seperti Instagram menunjukkan bagaimana konten yang dikurasi dapat memperkuat polarisasi politik. Generasi Z, yang merupakan pemilih muda, sangat aktif di media sosial dan dapat terpengaruh oleh konten yang mereka konsumsi, yang sering kali bersifat partisan (Fathurochman, 2023). Penelitian juga menunjukkan bahwa media massa berperan dalam membentuk opini publik, yang dapat mengarah pada polarisasi lebih lanjut, terutama ketika berita yang disajikan tidak proporsional atau tidak akurat (Putra & Hirzi, 2022; Qorib et al., 2020).

Secara keseluruhan, kontribusi media massa terhadap polarisasi publik sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk algoritme media sosial, kepentingan politik, dan kemampuan masyarakat untuk mengkritisi informasi yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan publik agar mereka dapat lebih kritis dalam menanggapi informasi yang disajikan oleh media massa (Sihombing & Setiawan, 2022; Kodoati & Maida, 2023; Anshori, 2023).

Media massa memegang peranan penting dalam membentuk dan memperkuat polarisasi publik, terutama dalam ranah politik. Berikut beberapa poin yang menguatkan pernyataan hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. **Algoritma Media Sosial dan "Echo Chambers":** Algoritma media sosial berperan dalam menciptakan "ruang gema" di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini memperkuat keyakinan yang telah ada dan mengurangi toleransi terhadap perbedaan pendapat.
2. **Bias Media:** Bias media, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat memperkuat polarisasi. Media yang cenderung memihak pada satu sisi pandangan politik tertentu dapat memperburuk perpecahan di masyarakat.
3. **Framing Partisan:** Framing berita yang partisan, yaitu penyajian berita yang condong pada satu sisi politik tertentu, dapat membentuk persepsi publik dan memperkuat keyakinan yang telah ada sebelumnya, sehingga menghambat dialog yang konstruktif.
4. **Konten Visual yang Emosional:** Konten visual yang menarik dan emosional dapat memicu respons emosional yang kuat dan memperkuat sikap yang sudah ada, memperburuk polarisasi.
5. **Pengaruh Kepentingan Politik:** Media massa dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat menyebabkan penyajian informasi yang bias dan tidak akurat. Hal ini mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif dan berimbang.

6. **Peran Media Massa dalam Pemilu:** Media massa berperan dalam membentuk opini publik, yang dapat mengarah pada polarisasi lebih lanjut, terutama ketika berita yang disajikan tidak proporsional atau tidak akurat. Penelitian Sitorus menunjukkan bagaimana interaksi sosial di platform media sosial, khususnya Instagram, dan konten yang dikurasi dapat memperkuat polarisasi politik, terutama di kalangan generasi Z.

Untuk mengatasi hal ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi media, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengkritisi informasi yang diterima dari media massa

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Polarisasi

Polarisasi publik merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk identitas politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan peran elite politik. Identitas politik sering kali menjadi pendorong utama polarisasi, di mana individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok politik tertentu dan mengembangkan sikap yang lebih ekstrem terhadap kelompok lain. Penelitian menunjukkan bahwa ketika individu terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka, hal ini dapat memperkuat sikap partisan dan menciptakan "echo chambers" di media sosial (Nguyen, 2018; Terren & Bravo, 2021). Fenomena ini memperburuk ketidakpahaman dan ketidakpercayaan antar kelompok, yang pada gilirannya memperdalam polarisasi.

Ketidaksetaraan ekonomi juga berkontribusi terhadap polarisasi publik. Ketika kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, ketidakpuasan sosial dapat meningkat, yang sering kali dieksploitasi oleh elite politik untuk memperkuat basis dukungan mereka. Elite politik dapat menggunakan retorika yang membangkitkan emosi dan ketakutan untuk membedakan "kami" versus "mereka," sehingga memperkuat polarisasi (Zheng, 2022; McCoy et al., 2018). Dalam konteks ini, media massa berperan penting dalam membentuk narasi yang mendukung atau menentang kebijakan tertentu, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dan memicu reaksi yang lebih ekstrem dari publik (Yang, 2023).

Peran elite politik dalam mempengaruhi polarisasi tidak dapat diabaikan. Elite politik sering kali memiliki insentif untuk memperdalam perpecahan, karena hal ini dapat meningkatkan mobilisasi pemilih dan memperkuat posisi mereka di dalam partai. Penelitian menunjukkan bahwa ketika elite politik terlibat dalam retorika yang memecah belah, hal ini dapat menciptakan suasana di mana konflik antar kelompok menjadi lebih intens (Zheng, 2022; McCoy et al., 2018). Selain itu, media massa sering kali berfungsi sebagai alat bagi elite politik untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendukung agenda mereka, yang dapat memperkuat polarisasi di kalangan publik (Yang, 2023; Anand, 2023).

Dari Hasil diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kunci yang mendorong polarisasi, antara lain:

1. **Identitas politik:** Individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok politik tertentu dan mengembangkan sikap ekstrem terhadap kelompok lain. Paparan informasi yang mendukung pandangan mereka memperkuat sikap partisan dan menciptakan *echo chambers* di media sosial, memperburuk ketidakpahaman dan ketidakpercayaan antar kelompok.
2. **Ketidaksetaraan ekonomi:** Kesenjangan antara kaya dan miskin memicu ketidakpuasan sosial yang dieksploitasi oleh elite politik untuk memperkuat basis dukungan mereka. Elite politik menggunakan retorika yang membangkitkan emosi dan ketakutan untuk menciptakan perbedaan "kami" versus "mereka". Media massa membentuk narasi yang mendukung atau menentang kebijakan, memperburuk ketidaksetaraan dan memicu reaksi ekstrem dari publik.
3. **Peran elite politik:** Elite politik memiliki insentif untuk memperdalam perpecahan demi mobilisasi pemilih dan memperkuat posisi mereka. Retorika yang memecah belah menciptakan suasana konflik antar kelompok yang lebih intens. Media massa menjadi alat elite politik untuk menyebarkan pesan yang mendukung agenda mereka, memperkuat polarisasi publik.

Secara keseluruhan, polarisasi publik dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara identitas politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan strategi elite politik. Untuk mengatasi polarisasi, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik dan media, sehingga individu dapat lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan mengurangi dampak negatif dari retorika yang memecah belah (Ritonga & Syahputra, 2019; Pérez-Escoda, 2023).

3. Strategi Komunikasi Politik untuk Mengurangi Polarisasi

Strategi komunikasi politik yang efektif sangat penting dalam mengurangi polarisasi publik, terutama di era digital saat ini. Berbagai pendekatan dapat diadopsi untuk menciptakan dialog yang lebih konstruktif dan inklusif di antara berbagai kelompok politik. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi politik. Gunawan Gunawan (2020) menjelaskan bahwa komunikasi politik yang baik harus melibatkan elemen-elemen yang mendukung demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman yang sering kali memicu polarisasi.

Selain itu, penting untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang positif. Sitorus Sitorus (2024) menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan wacana politik yang lebih seimbang dan mengurangi dampak negatif dari polarisasi. Dengan menciptakan konten yang mendorong dialog dan kolaborasi antar kelompok, media sosial dapat berfungsi sebagai platform untuk membangun jembatan antara pandangan yang berbeda. Ini sejalan dengan penelitian oleh Ramkita (Ramkita, 2023), yang menekankan pentingnya pengelolaan media sosial oleh aktor politik untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih positif.

Peran tokoh masyarakat juga sangat krusial dalam strategi komunikasi politik. Syabana Syabana (2023) menekankan bahwa tokoh masyarakat dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu menjembatani perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi. Dengan memanfaatkan pengaruh mereka, tokoh masyarakat dapat mendorong diskusi yang lebih terbuka dan inklusif, serta membantu mengurangi ketegangan yang ada.

Terakhir, penting untuk meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat. Pendidikan yang baik tentang proses politik dan cara berpartisipasi secara efektif dapat membantu individu memahami sudut pandang yang berbeda dan mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam pandangan ekstrem. Waluyo Waluyo (2019) menggarisbawahi bahwa pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi politik di era digital dapat membantu masyarakat berinteraksi dengan lebih konstruktif dan mengurangi polarisasi.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi politik yang efektif untuk mengurangi polarisasi melibatkan peningkatan transparansi, pemanfaatan media sosial secara positif, peran aktif tokoh masyarakat, dan peningkatan literasi politik. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih harmonis dan inklusif.

Berdasarkan hasil di atas, terdapat beberapa poin penting yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Komunikasi politik yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk mengurangi polarisasi. Dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses, publik dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terhindar dari misinformasi yang dapat memperkeruh suasana. [Gunawan] menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam komunikasi politik yang demokratis.
2. **Pemanfaatan Media Sosial yang Positif:** Media sosial memiliki potensi besar untuk menjembatani perbedaan dan mendorong dialog yang konstruktif. [Sitorus] menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan wacana politik yang lebih seimbang dan mengurangi dampak negatif polarisasi. Namun, penting bagi aktor politik untuk mengelola media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, seperti yang ditekankan oleh [Ramkita]. Membuat konten yang inklusif dan mendorong

kolaborasi antar kelompok dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun jembatan antara pandangan yang berbeda.

3. **Peran Tokoh Masyarakat:** Tokoh masyarakat, dengan pengaruh dan kredibilitas yang mereka miliki, dapat berperan sebagai mediator dalam menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi. [Syabana] menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam mendorong diskusi yang lebih terbuka dan inklusif, serta membantu mengurangi ketegangan yang ada.
4. **Peningkatan Literasi Politik:** Literasi politik yang memadai membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan memproses informasi politik. [Waluyo] menjelaskan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi politik di era digital dapat membantu masyarakat berinteraksi dengan lebih konstruktif dan mengurangi polarisasi. Dengan kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang bias dan tidak akurat, masyarakat dapat terhindar dari pengaruh informasi yang menyesatkan dan membuat keputusan politik yang lebih rasional.

Strategi-strategi ini saling melengkapi dan perlu diimplementasikan secara komprehensif untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurangi polarisasi publik.

KESIMPULAN

Polarisasi publik merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari identitas politik dan ketidaksetaraan ekonomi hingga peran elite politik dan media massa. Identitas politik yang kuat seringkali memicu ingroup bias dan polarisasi afektif, yang memperkuat prasangka terhadap kelompok lain. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat dieksploitasi oleh aktor politik untuk menciptakan perpecahan dan memperkuat basis dukungan mereka. Media massa, terutama di era digital, berperan dalam membentuk opini publik dan dapat memperburuk polarisasi melalui penyebaran disinformasi dan framing berita yang partisan. Algoritma media sosial menciptakan echo chambers yang membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda, sehingga menghambat dialog yang konstruktif dan memperkuat keyakinan yang telah ada. Untuk mengurangi polarisasi, diperlukan strategi komunikasi politik yang efektif dan komprehensif. Transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi politik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Pemanfaatan media sosial secara positif, dengan fokus pada dialog dan kolaborasi antar kelompok, dapat menjembatani perbedaan dan mengurangi ketegangan. Peran tokoh masyarakat sebagai mediator dan fasilitator dialog juga krusial dalam mendekatkan pandangan yang berbeda. Selain itu, peningkatan literasi politik dan media di kalangan masyarakat dapat membantu individu untuk lebih kritis dalam memproses informasi dan terhindar dari pengaruh informasi yang menyesatkan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terpadu, diharapkan dapat tercipta iklim politik yang lebih sehat dan demokratis.

REFERENSI

- Anand, K. (2023). Decoding mass media bias: an in-depth examination of content actor representation and partisanship in indian newspapers. *jrtd*. <https://doi.org/10.53555/jrtd.v6i3s.2637>
- Anshori, A. (2023). Dampak literasi politik dan pemilu 2024 bagi pemilih pemula terhadap pengendalian informasi hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86-97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Bahtiar. (2019). Komunikasi Massa Dalam Media Critical dan Media Equation. In *Al-Hikmah Media Dakwah Komunikasi Sosial dan Kebudayaan* (Vol. 10, Issue 1, p. 20). <https://doi.org/10.32505/hikmah.v10i1.1705>
- Fariansyah, M., Hidayat, D., & Basith, A. (2020). Konstruksi makna aksi massa 212 bagi wartawan detik.com. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.25487>
- Fathurochman, N. (2023). Penerimaan generasi z terhadap polarisasi politik. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6837-6845. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>
- Gunawan, R. (2020). Saluran komunikasi politik dalam pembangunan demokrasi pada pemilu legislatif dpr-ri di kota bogor 2019. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 141-151. <https://doi.org/10.46937/18202031350>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. In RESIPROKAL Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual (Vol. 4, Issue 2, p. 180). <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Kodoati, M. and Maida, S. (2023). Defisit kritis media massa: menimbang kebutuhan akan regulasi diri media massa berdasarkan pemikiran jæørgen habermas. Dialektika Komunika Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah, 11(1), 26-41. <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3534>
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities. American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42. <https://doi.org/10.1177/0002764218759576>
- Nguyen, J. (2018). Politics and the twitter revolution: a brief literature review and implications for future research. Social Networking, 07(04), 243-251. <https://doi.org/10.4236/sn.2018.74018>
- Pérez-Escoda, A. (2023). Charting the impacts of media discourses on the european integration project. Media and Communication, 11(4), 1-4. <https://doi.org/10.17645/mac.v11i4.7526>
- Putra, D. and Hirzi, A. (2022). Hubungan pemberitaan di media online dengan pembentukan opini pada mahasiswa universitas islam bandung. Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital, 36-41. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i1.835>
- Qorib, F., Ghofur, M., Aminulloh, A., & Widodo, H. (2020). Etika pemberitaan aksi penolakan penghitungan suara pada pilpres 2019. Ettisal Journal of Communication, 5(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.4291>
- Ramkita, M. (2023). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik (studi kasus sosial media dewan pimpinan wilayah partai keadilan sejahtera provinsi sumatera selatan). Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, 2(6), 538-546. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1009>
- Razali, M. M., & Hussin, N. I. (2021). New media and political activities among Malay youth in Selangor. In EDUCATUM Journal of Social Sciences (Vol. 7, Issue 1, p. 45). <https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.1.5.2021>
- Ritonga, R. and Syahputra, I. (2019). Citizen journalism and public participation in the era of new media in indonesia: from street to tweet. Media and Communication, 7(3), 79-90. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i3.2094>
- Septiyadi, C. A., Khafifah, Z., Khumairoh, A. S., & Hidayatullah, A. F. (2021). Truth Dan Post Truth Dalam Perspektif Al-Kindi Pada Era Milenial (Media Sosial). In Jurnal Penelitian Humaniora (Vol. 22, Issue 1, p. 40). Muhammadiyah University Press. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v22i1.9344>
- Sihombing, E. and Setiawan, M. (2022). Kerancuan berpikir: propaganda publik media pro-ukraina dalam situasi perang rusia-ukraina 2022. Sapientia Humana Jurnal Sosial Humaniora, 2(02), 182-192. <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i02.6160>
- Sitorus, H. (2024). Polarisasi politik melalui interaksi sosial di instagram: studi kasus pemilu 2024 di indonesia. Jkomdis Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial, 4(2), 383-394. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>
- Syabana, M. (2023). Komunikasi politik tokoh masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024 (studi kasus pada tokoh pemuka pendapat desa jatimulyo kecamatan jenggawah kabupaten jember). jbkbd, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47134/jbkbd.v1i1.1909>
- Terren, L. and Bravo, R. (2021). Echo chambers on social media: a systematic review of the literature. Review of Communication Research, 9, 99-118. <https://doi.org/10.12840/issn.2255-4165.028>
- Törnberg, P. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion. In PLoS ONE (Vol. 13, Issue 9). Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203958>
- Vivifriskilangela. (2023). ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGARUH POLITIK MENJELANG PEMILU. In Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin (Vol. 10, Issue 1, p. 555). <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.9604>
- Waluyo, D. (2019). Pemahaman komunikasi politik pada era digital. Diakom Jurnal Media Dan Komunikasi, 2(2), 160-167. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63>

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

- Yang, J. (2023). How mass media influences u.s. political polarization— a comparison study of cnn and fox news. *SHS Web of Conferences*, 178, 02005. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317802005>
- Zheng, B. (2022). Elite polarization and mass policy attitudes: a study of the 2010 senate election. *Social Science Quarterly*, 103(5), 1202-1220. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13199>
- Zonyfar, C., Maharina, M., Sihabudin, S., & Ahmad, K. (2022). Literasi Digital: Penguatan Etika Dan Interaksi Siswa Di Media Sosial. In *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* (Vol. 6, Issue 2, p. 1426). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7274>